



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KARTU TANI SISTEM BERTANI DENGAN AGRO SOLUTION (SIBEDAS) OLEH DINAS PERTANIAN DI KECAMATAN ARJASARI KABUPATEN BANDUNG

¹Putri Yulianti, ²Ujud Rusdia

¹Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Bale Bandung, Bandung, Jawa Barat, Indonesia
Putriyulianti271@gmail.com

²Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Bale Bandung, Bandung, Jawa Barat, Indonesia
Mr.Ujud@yahoo.com

Received 1 Januari 2024; Revised: 1 Januari 2024; Accepted: 2 Januari 2024; Published: Januari 2024; Available online: Januari 2024

ABSTRAK

Sektor pertanian Indonesia menjadi hal utama dalam perekonomian nasional dan ketahanan pangan. Indonesia memiliki kekayaan alam yang begitu melimpah dan sangatlah strategis. Sektor pertanian menjadi salah satu tumpuan ekonomi, sehingga pertanian memiliki peran penting dalam mengembangkan bidang ekonomi. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti melakukan penelitian terkait salah satu program kartu Sistem Bertani dengan Agro Solution dalam upaya meningkatkan geliat ekonomi sektor pertanian di Kabupaten Bandung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana, hambatan, dan upaya Implementasi Kebijakan Program Kartu Tani Sistem Bertani dengan *Agro Solution* di Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung. Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Kualitatif. Subjek penelitian utama adalah dinas pertanian, balai penyuluhan pertanian kecamatan arjasari, dan ketua gabungan kelompok tani kecamatan arjasari dengan teknik purposive sampling. Hasil Penelitian diharapkan dapat menunjukkan adanya proses bagaimana pemerintah kecamatan dalam mengimplementasikan kebijakan, adanya hambatan yang dirasakan oleh pemerintah kecamatan dalam mengimplementasikan kebijakan, dan adanya upaya yang dilakukan pemerintah kecamatan dalam menangani hambatan Implementasi Kebijakan Mengenai Program Kartu Tani Sistem Bertani Dengan *Agro Solution* Oleh Dinas Pertanian di Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung petani di Kecamatan Arjasari.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Kartu Tani Sistem Agrosolution, Pemerintah Kecamatan.

PENDAHULUAN

Sektor pertanian menjadi salah satu tumpuan ekonomi, sehingga pertanian memiliki peran penting dalam mengembangkan bidang ekonomi pembangunan. Tujuan umum dari berbagai kebijakan yakni, petani Indonesia diharapkan memiliki kemandirian dan pengembangan sumber daya manusia, dengan begitu hasil produktivitas akan mengalami

peningkatan. Indonesia merupakan negara Agraris yang memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang sangat melimpah dengan memiliki lahan pertanian yang luas dimana sebagian besar penduduknya berprofesi di sektor lahan pertanian. Sehingga pertanian menjadi sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu faktor pendorong

pertumbuhan perekonomian daerah serta sebagai profesi yang mampu mengurangi angka pengangguran. Melihat potensi besar yang dimiliki oleh sektor pertanian, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan petani dengan berlandaskan peraturan daerah (Perda) Nomor 10 tahun 2021 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, sebagai pelaku utama dalam mencapai keberhasilan pembangunan pertanian dan berkontribusi bagi keberlangsungan pemenuhan swasembada, kedaulatan dan ketahanan pangan diperlukan perlindungan dan pemberdayaan.

Perlindungan dan pemberdayaan petani diperlukan akibat kecenderungan adanya perubahan iklim, globalisasi dan gejolak ekonomi global, kerentanan terhadap bencana alam dan resiko usaha serta sistem pasar yang tidak berpihak kepada petani. Untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum bagi pelaksanaan strategi dan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani diperlukan pengaturan yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pembangunan pertanian di Indonesia bertujuan untuk menyejahterakan petani melalui subsidi input usaha tani (pupuk dan benih) maupun penerapan teknologi baru sehingga dapat meningkatkan produksi pertanian. Sebagai bentuk perlindungan terhadap petani, pemerintah Kabupaten Bandung meluncurkan Kartu Tani Sibedas yaitu sistem bertani dengan Agro Solution

yang merupakan upaya program perlindungan petani dan berdasarkan peraturan Bupati Nomor 138 Tahun 2021 tentang "Program Petani Bedas Sejahtera".

Implementasi Kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik (Winarno, 2007). Kartu Tani Sistem Bertani dengan Agro Solution memiliki beberapa manfaat yaitu memperoleh ganti rugi keuangan yang akan digunakan sebagai modal kerja usaha tani untuk pertanaman berikutnya, meningkatkan aksesibilitas petani terhadap sumber-sumber pembiayaan, mendorong petani untuk menggunakan input produksi sesuai anjuran usaha tani yang baik. Dan memiliki beberapa tujuan penggunaan Kartu Tani Sistem Bertani Dengan Agro Solution yaitu sebagai kartu identitas petani, alat transaksi perbankan, dan untuk mendapatkan akses bantuan premi asuransi usaha tani komoditas pangan utama. Kebijakan ini dibuat untuk memberikan bantuan bibit, pelatihan, pemberian modal, pengolahan sampai penjualan hasil tani.

Kabupaten Bandung merupakan salah satu kabupaten di Jawa Barat yang 20 tahun lalu terkenal sebagai lumbung padi bagi Kota Bandung. Lahan sawahnya terhampar di dataran rendah Cekungan Bandung. Lahan kering sebagai pusat pengembangan jagung, ubi kayu dan palawija lainnya membentang di dataran medium Cekungan Bandung. Sedangkan dataran tingginya yang

meliputi satuan kerucut gunung api di bagian utara dan selatan Cekungan Bandung terkenal sebagai sentra produksi sayuran yang tidak diragukan di Jawa Barat dan Indonesia pada umumnya. Hal tersebut semakin memperkuat fakta bahwa kabupaten bandung adalah salah satu kabupaten yang memiliki potensi pertanian yang sangat tinggi dan oleh Karena itu kabupaten bandung mulai melaksanakan distribusi Kartu Tani Sistem Agrosolution kepada para petani yang memiliki hak untuk menggunakan pupuk bersubsidi.

Kecamatan Arjasari adalah salah satu kecamatan yang sudah melaksanakan kebijakan Kartu Tani Sistem Agrosolution yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung. Kecamatan Arjasari merupakan daerah yang memiliki topografi bukit dengan sebagian besar wilayahnya terdiri atas lahan pertanian. Komoditas pertanian yang utama dari Kecamatan Arjasari yaitu padi sawah. Sementara untuk produk perkebunan unggulan dari Kecamatan Arjasari untuk pasar lokal adalah jagung manis, dan untuk produk unggulan untuk pasar ekspor adalah ubi jalar yang mana negara tujuan utamanya yaitu Hongkong. Berdasarkan kondisi tersebut terlihat bahwa masyarakat di wilayah kecamatan Arjasari sangat menggantungkan hidup pada sektor pertanian dan perkebunan. Pendapatan masyarakatnya sangat

dipengaruhi oleh hasil produksi pertanian dan perkebunan.

Produk pertanian yang banyak dihasilkan oleh masyarakat di Kecamatan Arjasari antara lain jagung manis, bawang merah, padi, ubi jalar dan cabai. Para petani dalam satu tahun bisa menanam sampai tiga kali. Selama satu tahun perputaran uang petani pada satu desa bisa mencapai 2,5-2,7 miliar rupiah, dihitung dari hasil pertanian satu jenis tanaman saja seperti bawang merah. Beberapa hasil pertanian di Kecamatan Arjasari di jual ke Ibu Kota Jakarta bahkan ubi Jalar telah diekspor sampai ke Hongkong yang dalam satu Bulannya bisa mengekspor 20 hingga 30 ton ubi jalar.

Potensi Pengembangan pertanian ini tentu sangat Menjanjikan dan menguntungkan para petani di wilayah Kecamatan Arjasari karena pasar Baik skala lokal maupun internasional sudah sangat terbuka. Sementara kegiatan perkebunan berupa persembahan bibit kopi dan pupuk. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah kelompok tani di Kecamatan Arjasari per tahun 2023 mencapai 61 kelompok tani. Dari pemaparan dan data di atas dapat kita simpulkan bahwa Kecamatan Arjasari adalah Kecamatan yang masyarakat didalamnya mayoritas berprofesi sebagai petani sehingga kebutuhan petani terhadap Kartu Tani Sistem Bertani dengan Agro Solution sangatlah besar.

Dalam Pelaksanaan program Kartu Tani Sistem Bertani dengan

Agro Solution di Kecamatan Arjasari masih terdapat beberapa permasalahan yang peneliti temukan diantaranya yaitu permasalahan terkait komunikasi antara pembuat kebijakan dan sasaran kebijakan sehingga masih adanya beberapa kelompok tani di kecamatan Arjasari yang kurang memahami tujuan dan manfaat dari program Kartu Tani Sistem Bertani Dengan *Agro Solution*. Komunikasi adalah tahapan yang krusial dalam sebuah kebijakan. Komunikasi menjadi hal yang terpenting bagi kehidupan bersama, tidak terkecuali komunikasi kebijakan. Masih banyak praktik-praktik kebijakan yang mengesampingkan aspek komunikasi publik, sehingga menimbulkan berbagai kesalahpahaman dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Oleh karena itu, perlu adanya kesadaran bersama dari para perumus dan pemangku kebijakan agar memasukkan strategi komunikasi yang baik sebagai salah satu instrumen untuk mendukung implementasi kebijakan yang efektif. penting bagi pemerintah untuk senantiasa berupaya meningkatkan kepercayaan masyarakat. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan membuka komunikasi seperti halnya mensosialisasikan kebijakan yang telah dibuat kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui maksud dan tujuan dari kebijakan tersebut, serta menyusun

strategi komunikasi yang komprehensif.

Kurang kooperatifnya masyarakat kelompok tani untuk mengikuti pembinaan peningkatan pemahaman dan pengetahuan mengenai peningkatan hasil pertanian juga menjadi salah satu kendala dalam keberlangsungan implementasi kartu tani dengan sistem agrosolution. Keberadaan sarana produksi seperti benih, pupuk, dan obat-obatan yang tersedia tepat waktu dan tepat jumlah merupakan prasyarat keberhasilan usaha tani. Dalam konteks inilah kartu tani menjadi bagian yang sangat relevan untuk memudahkan petani memperoleh pupuk tertentu sesuai kebutuhannya, yang harganya disubsidi oleh pemerintah, sehingga secara kumulatif akan mengurangi biaya produksi dan memberikan keuntungan bagi petani. Partisipasi masyarakat menjadi indikator penting dalam menghasilkan kebijakan publik yang tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan penyelenggaraan negara, terutama dalam negara demokrasi seperti Indonesia.

Program Kartu Tani memiliki banyak manfaatnya adalah membantu proses distribusi pupuk subsidi agar lebih tepat sasaran. Tidak semua orang dapat memiliki kartu ini. Sebab, ada rangkaian proses yang harus di jalani. Tujuannya agar bantuan subsidi pupuk benar-benar tepat sasaran. Pendataan merupakan proses awal untuk kita mengetahui masyarakat mana yang sesuai dengan kriteria dan berhak mendapatkan

bantuan atau subsidi dari pemerintah. Begitu pula dengan kartu tani sistem agrosolution yang memerlukan data yang valid sehingga kebijakan sesuai dengan sasaran. Pendataan akan berjalan baik jika sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah dijalankan dengan maksimal sehingga seluruh aspek masyarakat mengetahui akan adanya kebijakan tersebut. Kebijakan yang kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia maka hal ini akan menyebabkan sumber-sumbernya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Kerjasama antara instansi kecamatan dengan instansi yang berkaitan haruslah dijalankan dengan maksimal seperti halnya pendataan terkait nomor induk petani, sehingga masyarakat yang berhak dan sesuai dengan kriteria penerima manfaat kartu tani tercover.

Kurangnya sosialisasi salah satu yang menjadi faktor permasalahan yang dialami Kecamatan Arjasari sehingga Kartu Tani Sistem Bertani Dengan *Agro Solution* belum dirasakan menyeluruh oleh para petani dan masih ada petani yang belum memiliki Kartu Tani Sistem Bertani Dengan *Agro Solution*. Kebijakan Kartu tani sistem Agrosolution hadir dengan tujuan agar supaya para petani dapat dengan mudah mendapatkan pupuk bersubsidi akan tetapi fakta dilapangan berbeda dengan harapan pembuat kebijakan dimana petani

tidak mengapresiasi positif bahkan cenderung menolak program karena sistem penebusannya yang dipandang rumit serta merasa tidak memiliki kebebasan dalam penebusan pupuk bersubsidi.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Kebijakan Publik

James E. Anderson (Irfan Islamy, 2000: 17) mendefinisikan kebijakan itu adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu). Sedangkan dalam pengertian lain Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu.

Berdasarkan pada hal tersebut, dapat dikatakan bahwa kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh suatu aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan

2. Implementasi Kebijakan

Dalam buku (Winarno, 2007) menjelaskan bahwa Implementasi Kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan dipandang

dalam pengertian luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan Undang-Undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan Undang-Undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program.

Sedangkan Dalam buku (Agustino, 2006), menjelaskan bahwa Implementasi kebijakan merupakan suatu proses dalam kebijakan publik yang mengarah pada pelaksanaan kebijakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis karena adanya intervensi dari berbagai kepentingan.

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variable dan masing-masing variable tersebut saling berhubungan satu sama lain. Maka dari itu, teori yang digunakan dalam penelitian saat ini yaitu menggunakan teori yang dikembangkan oleh George C. Edward III disebut dengan *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Dalam pendekatan yang dikemukakan oleh Edward III, terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu:

2.1 Komunikasi

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dan implementasi kebijakan publik.

Implementasi yang efektif baru akan terjadi apabila para pembuat keputusan (*decision-makers*) sudah mengetahui apa yang mereka kerjakan.

2.2 Sumberdaya

Merupakan hal penting lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan dengan baik. Indikator-indikator yang digunakan untuk melihat sejauhmana sumberdaya dapat berjalan dengan baik dan rapi

2.3 Disposisi, atau sikap pelaksana kebijakan

Faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik.

2.4 Struktur Birokrasi

Kebijakan yang kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, kata kualitatif merupakan turunan dari kualitas, sering dipahami oleh masyarakat sebagai lawan dari kuantitas yang mrnunjuk pada jumlah (angka) atau banyaknya suatu objek tertentu seperti kuantitas air, kuantitas penduduk dan sebagainya. Penelitian kualitatif lebih melihat pada kualitas objek penelitian misalnya nilai, makna, emosi manusia, penghayatan keberagaman keindahan karya seni, nilai sejarah dan lain lain. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan naratif. Adapun pendekatan naratif digunakan untuk dapat fokus pada

pengalaman dan kronologi individu secara lebih rinci serta dapat memahami identitas dan pandangan dunia seseorang dengan mengacu pada cerita-cerita (narasi) yang ia dengar ataupun tuturkan di dalam kehidupannya sehari-hari.

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Arjasari mengenai Implementasi Kebijakan Program Kartu Tani Sistem Bertani Dengan Agro Solution (Sibedas) Oleh Dinas Pertanian Di Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung. Adapun waktu dalam proses penelitian ini yaitu dari Bulan Maret. Pada penelitian kualitatif subjek penelitian disebut dengan istilah informan, subjek penelitian ini ditentukan berdasarkan *purposive sampling* yang merupakan teknik pengambilan *sampel* sumber data dengan pertimbangan tertentu. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian untuk memperoleh data kualitatif adalah sebagai berikut:

- a. Teknik Observasi
- b. Teknik Wawancara
- a. Dokumentasi

Langkah selanjutnya peneliti melakukan tahap analisa data dengan menggunakan teknik analisa deskriptif, yaitu bentuk penelitian untuk mengumpulkan informasi actual secara rinci peristiwa fenomena yang dapat menggambarkan pola komunikasi dalam suatu kelompok.

HASIL PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Program Kartu Tani Sistem Bertani Dengan

Agro Solution (Sibedas) Oleh Dinas Pertanian Di Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung.

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Program Kartu Tani Sistem Bertani Dengan Agro Solution Oleh Dinas Pertanian Di Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung

Implementasi akan berjalan efektif bila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam kinerja kebijakan. Komunikasi memegang peranan penting dalam kesuksesan suatu kebijakan sebagaimana dikemukakan oleh Edward III bahwa keputusan kebijakan dan perintahnya harus diteruskan kepada orang yang tepat dan dikomunikasikan dengan jelas dan akurat agar dapat dimengerti dengan cepat oleh pelaksana.

Komunikasi kebijakan terkait kartu tani di kecamatan arjasari terjadi ketika suatu produk hukum atau kebijakan yang telah disahkan oleh gubernur dengan sendirinya terkomunikasikan dengan dinas-dinas yang bertanggungjawab dengan pelaksanaan kebijakan, dinas-dinas terkait dan pemerintah dibawah gubernur yaitu kabupaten, kecamatan, dan kelurahan. Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang sangat baik pula. Sering kali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (miskomunikasi), hal tersebut disebabkan komunikasi telah melalui

beberapa tingkatan birokrasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan. transmisi menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (implementers) kebijakan, tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan. Untuk menghindari miskomunikasi itu terjadi ialah dengan memperhatikan koordinasi yang dijalankan antara pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan.

Dari hasil penelitian dapat menyimpulkan bahwa komunikasi yang dibangun antara instansi pelaksana kebijakan sudah berjalan dengan baik, namun sosialisasi ke masyarakat terkait Kartu Tani ini belum berjalan secara optimal. Pada dasarnya komunikasi terhadap masyarakat merupakan hal yang sangat penting dan harus dilakukan oleh lembaga-lembaga Pemerintahan, sehingga masyarakat dapat mengetahui dan memahami secara keseluruhan terkait Kartu Tani dan mekanisme penggunaannya.

Sumber daya manusia Sebagai pelaksana kebijakan dimana sumber daya manusia memiliki jumlah yang cukup dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan kebijakan. Yang dimaksud sumber daya manusia tersebut memiliki jumlah yang cukup dan memenuhi kualifikasi adalah para pelaksana yang berjumlah cukup dan memiliki kemampuan dan

keterampilan yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan. Jumlah pelaksana yang banyak tidak otomatis mendorong implementasi yang berhasil jika tidak memiliki keterampilan yang memadai di sisi lain kurangnya personil yang memiliki keterampilan juga akan menghambat pelaksanaan kebijakan tersebut. Mengenai keterampilan staf kita bisa lihat dari sudut sejauh mana tingkat prestasi yang telah dilakukan oleh staf.

Tingkat prestasi tersebut dapat dilakukan oleh individu (kinerja individu), dapat dilakukan oleh kelompok (kinerja kelompok), dan dapat dilakukan oleh organisasi (kinerja organisasi). Kinerja individu menggambarkan sampai seberapa jauh seseorang telah melaksanakan tugas pokoknya sehingga dapat memberikan hasil yang ditetapkan oleh kelompok atau institusi. Dari hasil penelitian ditemukan kasus bahwa masih adanya permasalahan dalam pengolahan data. Kurangnya koordinasi antara instansi terkait pendataan calon penerima manfaat Kartu Tani Sistem Bertani Dengan *Agro Solution* di Kecamatan Arjasari salah satu yang menjadi kendala dalam pendataan. Program Kartu Tani merupakan salah satu upaya mereformasi program subsidi pupuk dan penyempurnaan data petani. Tranparansi dan akurasi data Kartu Tani sangat penting karena ke depan akan menjadi data pertanian yang lebih luas. dengan data yang pasti, petani yang akan diberi pupuk

bersubsidi tidak sekadar berdasarkan 'kira-kira' tetapi berdasarkan kriteria. Data dari tahun 2022-2023 kelompok tani di kecamatan arjasari ialah 61 kelompok tani yang tersebar di 11 Desa yang ada di Kecamatan Arjasari. Pendataan dilakukan oleh penyuluh pertanian terhadap petani pemilik, penggarap, penyewa. Dengan banyaknya dapoktan yang ada di kecamatan arjasari diperlukan adanya koordinasi yang baik antara penyuluh dan petani sehingga dapat memudahkan untuk mendapatkan data yang akurat sehingga program kartu tani ini bisa diimplementasikan dengan baik dan sesuai dengan sasaran yang dituju.

Kepatuhan muncul dalam literatur administrasi publik dengan fokus perhatian pada upaya membangun kepatuhan agen atau individu bawahan terhadap agen atau individu atasan dalam suatu organisasi. Perspektif kepatuhan merupakan analisis karakter dan kualitas perilaku organisasi. Proses implementasi kebijakan yang mengharuskan implementor agar lebih leluasa mengadakan penyesuaian. Dengan demikian, kepatuhan pelaksana terhadap atasan perlu ditunjukkan sebagai bukti keberhasilan implementasi kebijakan atau program. Keberhasilan kebijakan sangat ditentukan pada tahap implementasinya dan keberhasilan proses implementasi ditentukan oleh kemampuan implementor, yaitu: kepatuhan implementor mengikuti apa yang diperintahkan oleh atasan,

dan kemampuan implementor melakukan apa yang dianggap tepat sebagai keputusan pribadi dalam menghadapi pengaruh eksternal dan faktor non-organisasional. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan kasus bahwa kepatuhan pelaksana implementasi kebijakan program kartu tani ini masih belum optimal terbukti dengan adanya permasalahan kurang kooperatifnya masyarakat kelompok tani di kecamatan Arjasari untuk mengikuti pembinaan peningkatan pemahaman dan pengetahuan mengenai peningkatan hasil pertanian.

Sikap para pelaksana dalam kesediaan menerima dan melaksanakan suatu kebijakan tanpa suatu paksaan merupakan keberhasilan dalam melaksanakan suatu kebijakan namun akan berbeda jika sikap para pelaksana kebijakan tidak sepakat dalam melihat substansi suatu kebijakan yang berbeda dengan pandangan mereka di samping itu mungkin sikap para pelaksana yang menghindari dampak dari suatu kebijakan dengan melihat secara selektif persyaratan atau mengabaikan beberapa persyaratan yang bertentangan dengan pandangan mereka.

Dari hasil penelitian dapat peneliti simpulkan bahwa masih adanya disposisi antara birokrat dan pelaksana kebijakan ditandai dengan adanya kecenderungan sikap menolak dari beberapa petani yang menganggap program Kartu Tani Sistem Bertani Dengan *Agro Solution*

dipandang rumit. Kartu tani sebagai salah satu inovasi teknologi memerlukan waktu dan proses adopsi sebelum diimplementasikan oleh petani pengguna. Sebelum mengadopsi suatu inovasi baru, perlu diperhatikan bagaimana persepsi petani terhadap kartu tani. Persepsi diartikan sebagai suatu pandangan dan interpretasi sensorik terhadap suatu informasi untuk menyediakan pemahaman menyeluruh terhadap faktor lingkungan. Sementara inovasi adalah suatu penemuan obyek yang baru oleh individu atau group untuk dapat diadopsi.

Program kartu tani merupakan salah satu cara efektif dalam mengalokasikan dana hibah untuk sarana dan prasana bertani. Tujuan utama program kartu tani adalah agar distribusi dana hibah dapat tepat sasaran, dan dinikmati petani kecil. Kartu tani berfungsi sebagai alat transaksi yang menjamin bahwa petani kecil memperoleh sarana dan prasarana yang dibutuhkannya sesuai dengan jumlah dan waktu (menurut RDKK), sehingga kegiatan usaha tani dapat berjalan dengan baik. Sehingga perlu sinkronisasi dan kesamaan pandangan terkait regulasi pelaksanaan kartu tani secara nasional sehingga tidak ada kesalahpahaman dalam tahap implementasi di level kabupaten, maupun tingkat petani. Kartu tani adalah bagian dari program pembangunan pertanian di daerah maka dari itu perlunya meningkatkan koordinasi dan kerjasama yang lebih intensif antara pihak Bank, Dinas

Pertanian, pihak Kecamatan, dan Petani.

Birokrasi merupakan salah satu unsur dalam implementasi kebijakan, birokrasi baik secara sadar maupun tidak sadar memiliki bentuk-bentuk organisasi untuk kesepakatan kolektif dalam rangka memecahkan masalah sosial dalam kehidupan modern yang terkadang sengaja dibentuk untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu ada dua karakteristik utama dalam demokrasi yaitu prosedur kerja baku standar atau sop berkembang sebagai tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dan sumber dari para pelaksana serta keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi yang kompleks dan tersebar luas.

struktur birokrasi pada program kartu tani siberdas ini sudah maksimal. Dibuktikan dengan adanya Pembagian pekerjaan, artinya dalam melaksanakan kebijakan publik, kegiatan-kegiatan dibagi kepada orang-orang yang terlibat dalam kebijakan publik tadi. Pembagian pekerjaan harus menganut pada prinsip "the right man on the right jobs", pekerjaan dikerjakan oleh orang yang tepat (sesuai dengan pengetahuan, kecakapan, dan pengalaman yang dimiliki). Pekerjaan tidak didominasi oleh orang atau bagian tertentu saja. Dengan adanya pembagian pekerjaan, orang-orang akan melaksanakan pekerjaan tertentu, sehingga mereka tahu apa yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya. Dengan setiap

harinya mereka melaksanakan pekerjaan tertentu, maka diharapkan orang yang bersangkutan menjadi ahli (spesialisasi) dalam bidang pekerjaan yang ditugaskannya, yang pada gilirannya akan mendatangkan "produktivitas" yang tinggi. Dengan demikian pembagian pekerjaan menjadi penting Karena orang menjadi ahli dalam bidang tertentu, dan karena mereka ahli, maka pada akhirnya produktivitas mereka menjadi tinggi.

2. Hambatan Implementasi Kebijakan Program Kartu Tani Sistem Bertani Dengan Agro Solution Oleh Dinas Pertanian Di Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung

Komunikasi menjadi titik utama dalam suksesnya keberlangsungan pelayanan publik guna mewujudkan good governance sebab pemerintah berperan sebagai komunikator yang mengalirkan berbagai info pada masyarakat dan mempersuasi masyarakat agar ikut aktif dalam pengembangan sumber daya publik. Begitupun dengan kebijakan Program Kartu Tani Sistem Bertani Dengan *Agro Solution* Oleh Dinas Pertanian Di Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung akan berjalan dengan maksimal apabila komunikasi yang dibangun oleh para implementor dijalankan dengan baik sehingga tujuan dari adanya kebijakan tersebut akan tercapai. Namun fakta dilapangan peneliti menemukan adanya permasalahan komunikasi

oleh pelaksana kebijakan. Permasalahan komunikasi yang terjadi dilapangan lebih kepada masalah sosialisasi yang belum dilaksanakan secara maksimal oleh pihak Kecamatan Arjasari sehingga masih banyak masyarakat khususnya para petani yang belum mengetahui secara menyeluruh terkait mekanisme penggunaan kartu tani, seperti yang disampaikan oleh lima Ketua Gabungan Kelompok Tani yang tersebar di lima Desa Di Kecamatan Arjasari, lima ketua kelompok tani tersebut diantaranya:

Muhammad Nasikin selaku Ketua Gabungan Kelompok Tani Desa Arjasari Kecamatan Arjasari pada tanggal 16 Juli 2023 pada pukul 14:30 WIB di Desa Arjasari, beliau menyampaikan bahwa:

“Permasalahan umum yang dirasakan para petani sejauh ini ialah masih belum mengerti betul terkait mekanisme penggunaan kartu tani ini, sosialisasi yang dilakukan oleh kecamatan saya rasa kurang maksimal karena hanya dilakukan beberapa kali pertemuan. Kami berharap kedepanya kecamatan bisa turun langsung bertemu dengan para petani yang rata-rata usianya sudah sepuh supaya bisa diberi pemahaman langsung jadi kita sebagai ketua kelompok tani tidak terlalu kesulitan karena dibantu juga oleh kecamatan untuk menjelaskan secara detail

mengenai mekanisme penggunaan kartu tani ini”.

Dari hasil wawancara di atas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh pihak kecamatan belum berjalan dengan maksimal. Sosialisasi atau memberikan pemahaman kepada masyarakat dan stakeholder terkait tentang program, kebijakan, dan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat harus terus dilakukan untuk membantu menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat. Pelaksanaan sosialisasi dapat dikatakan sebagai bagian dari proses komunikasi, dengan tujuan memberikan informasi dan pemahaman terhadap materi dari program pembangunan. Sosialisasi merupakan proses paling penting yang secara sadar atau tidak kita sudah jalani dalam kesehariannya. Sosialisasi adalah penyampaian informasi secara terbuka berupa (peraturan, program, keputusan) dari satu pihak (pemilik program) ke pihak lain (masyarakat luas) dan proses pemberdayaan, dimana diharapkan dapat menumbuhkan perubahan sikap, perilaku masyarakat dan menumbuhkan kesadaran kritis.

Belum maksimalnya sosialisasi yang dilakukan oleh Kecamatan Arjasari menjadi salah satu faktor penghambat jalannya implementasi Kebijakan Program Kartu Tani Sistem Bertani Dengan *Agro Solution* Oleh Dinas Pertanian Di Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung hal

tersebut dibuktikan dengan masih adanya beberapa kelompok tani di kecamatan Arjasari yang kurang memahami tujuan dan manfaat dari program Kartu Tani Sistem Bertani Dengan *Agro Solution*, dan kartu tani ini belum dirasakan menyuluruh oleh petani yang ada di Kecamatan Arjasari. Tentu, tidak akan ada Pemerintah yang bisa bekerja sempurna. Selalu ada kelemahan, namun demikian harus meminimalisasi kesalahan dari hal-hal yang sesungguhnya bisa diantisipasi sejak dini. Salah satu yang bisa diantisipasi adalah koordinasi komunikasi. Narasi Pemerintah yang menjadi pesan untuk public saat diimplementasikannya sebuah kebijakan harus jelas, argumentative dan dirasakan niat baik untuk membangun pemahaman bersama.

Salah satu yang menjadi hambatan Kecamatan Arjasari dari implementasi kartu tani dilihat dari sumberdaya indikator informasi cara melaksanakan kebijakan ialah Kurangnya koordinasi antara instansi terkait pendataan calon penerima manfaat Kartu Tani Sistem Bertani Dengan *Agro Solution* di Kecamatan Arjasari hal tersebut dibuktikan dengan adanya masalah dalam pendataan, dimana ada beberapa faktor yang mengakibatkan adanya kesulitan dalam pendataan diantaranya kesalahan dalam penginputan Nomor Induk Kependudukan, Nomor Induk Kependudukan Petani yang tidak sesuai dengan disdukcapil, Mayoritas

petani belum memiliki status E-KTP. Berangkat dari kasus inilah pihak kecamatan arjasari merasa kesulitan dalam mendata petani yang ada di Kecamatan Arjasari sedangkan program kartu tani sistem bertani dengan *agro solution* ini adalah program yang berbasis dengan data kependudukan.

Hal tersebut peneliti dapatkan dari hasil wawancara dengan Ria Selaku Kepala Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung yang dilakukan pada tanggal 5 Juli 2023 pada pukul 15:00 di Kantor Kecamatan Arjasari yang menyatakan:

“Hambatan yang kita rasakan lebih kepada pendataan, seperti yang kita ketahui program kartu tani ini berbasis dengan data kependudukan, terkadang kita masih sering menemukan masyarakat yang status KTP nya masih KTP lama belum E-KTP kan itu menyulitkan kita untuk menyinkronkan data ke disdukcapil, belum lagi karena faktor jumlah petani yang banyak bisa sampai ribuan kadang kita salah menginput satu digit nomor KTP itupun menjadi masalah karena nantinya tidak akan data yang salah tidak akan muncul di disdukcapil”.

Data kependudukan adalah data individu atau perseorangan yang terstruktur melalui kegiatan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan sensus penduduk. Data

kependudukan penting diketahui karena dalam membuat kebijakan maupun perencanaan pembangunan daerah atau negara, data kependudukan diperlukan sebagai gambaran kondisi suatu daerah. Data ini dibutuhkan oleh instansi terkait untuk verifikasi atau memastikan kebenaran informasi yang disampaikan oleh penduduk mengenai identitas dirinya dan menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan program dari instansi terkait termasuk program kartu tani sistem bertani *agro solution*.

Program kartu tani ini, hal yang paling utama mengacu pada data Nomor Induk Kependudukan (e-KTP) anggota tani penerima kartu tani sistem bertani dengan *agro solution*. Setelah pendataan NIK e-KTP dan keanggotaan kelompok tani, maka data anggota tani akan terangkum dalam data e-RDCK. Selama ini data manual yang dijadikan rujukan dalam mendistribusikan pupuk bersubsidi berpotensi dimanipulasi. Terdapat data ganda pada validasi manual yang tidak tepat penyaluran. Sehingga dengan adanya kebijakan e-RDCK ini berguna memperketat penyaluran dana hibah sehingga tidak diselewengkan dan mencegah duplikasi maupun manipulasi penerima kartu tani sistem bertani dengan *agro solution*.

Oleh sebab itu pentingnya koordinasi antar instansi untuk menyelesaikan permasalahan pendataan ini sehingga pendataan dapat dilaksanakan dengan valid

sesuai dengan disdukcapil dan tujuan dari kebijakan kartu tani sistem bertani dengan *agro solution* berjalan dengan tepat sasaran. Selain informasi cara melaksanakan kebijakan, Indikator yang digunakan untuk melihat sejauhmana sumberdaya dapat berjalan dengan baik dan rapi salah satunya yaitu informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Hambatan terkait dengan data kepatuhan dari para pelaksana ialah Kurang kooperatifnya masyarakat kelompok tani di kecamatan Arjasari untuk mengikuti pembinaan peningkatan pemahaman dan pengetahuan mengenai peningkatan hasil pertanian.

Hal tersebut peneliti dapatkan dari hasil wawancara dengan dengan Ria Selaku Kepala Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung yang dilakukan pada tanggal 5 Juli 2023 pada pukul 15:25 di Kantor Kecamatan Arjasari yang menyatakan:

“Berbicara terkait kepatuhan kita tidak bisa memungkiri bahwa masih ada beberapa petani yang tidak ikut serta mendukung dalam program kartu tani ini, ini dibuktikan dengan masih adanya beberapa petani yang memilih untuk independen tidak masuk dalam anggota kelompok tani sedangkan kelompok tani ini merupakan wadah para petani untuk mendapatkan bantuan

dana hibah untuk pembelian sarana dan prasarana untuk bertani. Dan dalam pertemuan koordinasi rapat yang kita adakanpun masih banyak petani yang tidak hadir sehingga sosialisasi yang seharusnya berjalan dan tepat sasaran terhambat”.

Keterlibatan masyarakat dalam proses kebijakan publik, termasuk dalam penyusunan dan perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah dan pendek keterlibatan harus dipenuhi. masyarakat juga merupakan aktor dalam proses penyusunan dan perencanaan sebuah kebijakan. Indonesia adalah negara demokrasi yang artinya dalam pembuatan peraturan selalu mementingkan rakyatnya sendiri. Pembuatan peraturan bersifat transparansi sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam setiap tahapan pembentukan peraturan yang dimulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, dan pengesahan/penetapan. Sebuah kebijakan dapat berjalan dengan maksimal jika semua implementor dapat bekerjasama dengan baik.

Dari penjelasan di atas dapat peneliti simpulkan bahwa terdapat hambatan dalam sumberdaya informasi data kepatuhan pelaksana dimana masih ada beberapa petani yang tidak patuh hal tersebut dibuktikan dengan kurangnya partisipasi masyarakat dalam

mengikuti pembinaan peningkatan pemahaman dan pengetahuan mengenai peningkatan hasil pertanian.

Dalam kasus implelementasi kebijakan kartu tani sistem bertani dengan *agro solution* di Kecamatan Arjasari ini ada hambatan terkait disposisi dimana ditemukan adanya kecenderungan sikap menolak dari beberapa petani yang menganggap program Kartu Tani Sistem Bertani Dengan *Agro Solution* dipandang rumit, hal tersebut peneliti dapatkan dari hasil wawancara dengan Muhammad Nasikin selaku Ketua Gabungan Kelompok Tani Desa Arjasari Kecamatan Arjasari pada tanggal 16 Juli 2023 pada pukul 15:00 WIB di Desa Arjasari yang menyatakan:

“Karena rumitnya mekanisme pencairan atau penggunaan kartu tani ini maka banyak diantara kami para petani yang memilih untuk idependen tanpa menggunakan atau mengikuti program kartu tani ini. Selain itu. Kita mendukung denga adanya bantuan dari kartu tani ini tapi alangkah lebih baik sebelum mengeluarkan sebuah kebijakan harus di rencanakan dengan matang sehingga pemerintah dapat membuat planning untuk mengatasi hambatan yang akan dirasakan dilapangan dan sudah menyiapkankn upaya seperti apa yang akan dilakukan”.

Dari hasil wawancara tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa ada hambatan terkait disposisi dibuktikan dengan adanya penolakan oleh beberpa petani terkait program kartu tani tersebut. Pada dasarnya disposisi dalam sebuah kebijakan merupakan masalah yang penting yang harus diperhatikan dan sedini mungkin untuk mengambil upaya penyelesaian masalahnya. Implementasi kebijakan akan berjalan dengan baik dan tepat sasaran jika semua pelaksana yang berkaitan saling bekerjasama untuk menjalankan sebuah program.

3. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan Implementasi Kebijakan Program Kartu Tani Sistem Bertani Dengan Agro Solution Oleh Dinas Pertanian Di Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung.

Dalam melakukan komunikasi publik, setiap aktor pemerintah perlu menyadari bahwa pendapat dan sikap mereka, baik disengaja maupun tidak, dapat menimbulkan anggapananggapan tertentu di kalangan masyarakat. Untuk mencegah pendapat atau tindakan yang multitafsir atau bertentangan dengan pesan yang pemerintah sudah rencanakan, komunikasi lintas saluran, aktor, dan tingkat pemerintahan memerlukan koordinasi yang intensif untuk dapat selaras satu sama lain. Setiap aktor pemerintah perlu menyadari pentingnya kehatihatian dan

koordinasi dalam penyampaian pendapat terkait kebijakan.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan dalam mensosialisasikan bantuan Program Kartu Tani Sistem Bertani Dengan *Agro Solution* yaitu dengan melakukan rapat koordinasi yang dilaksanakan dua kali dalam satu bulan dengan mengumpulkan semua ketua kelompok tani yang tersebar di setiap desa di Kecamatan Arjasari, dengan diadakannya rapat tersebut pihak Kecamatan Arjasari berharap komunikasi dengan para petani berjalan dengan baik.

Ketersediaan sumber daya manusia dalam hal kuantitas tidaklah cukup dalam mencapai keberhasilan implementasi suatu kebijakan tanpa diimbangi dengan kualitas sumber daya manusianya juga. Selain kuantitas, kualitas sumber daya manusia juga menjadi hal yang penting. Dibutuhkan orang-orang yang berkompeten dalam bidangnya sehingga suatu kebijakan dapat tepat sasaran dan tujuan. Untuk memperbaiki kualitas pelaksana yang menyebabkan permasalahan pendataan pada program kartu tani yang disebabkan oleh kurangnya koordinasi antara instansi terkait pendataan calon penerima manfaat Kartu Tani Sistem Bertani Dengan *Agro Solution* di Kecamatan Arjasari yaitu dengan melakukan kerjasama antara instansi yang tuposinya berkaitan dengan pendataan penduduk, mengupayakan untuk melatih kembali kemampuan personil

yang menangani perihal pendataan, koordinasi dengan disdukcapil terkait data calon penerima manfaat kartu tani sistem bertani dengan *Agro Solution*. bahwa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan dalam menangani permasalahan pendataan pada program kartu tani yang disebabkan oleh kurangnya koordinasi antara instansi terkait pendataan calon penerima manfaat Kartu Tani Sistem Bertani Dengan *Agro Solution* di Kecamatan Arjasari sudah berjalan dengan optimal.

Dalam sumberdaya pula terdapat kepatuhan pelaksana yang tidak kalah pentingnya, kepatuhan pelaksana dalam melaksanakan kebijakan sangat berpengaruh dalam menentukan apakah kebijakan tersebut terimplementasikan atau tidak. Salah satu masalah yang terjadi yaitu masih kurangnya kooperatif masyarakat kelompok tani untuk mengikuti pembinaan peningkatan pemahaman dan pengetahuan mengenai peningkatan hasil tani, Upaya yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan terkait masalah tersebut ialah melakukan sosialisasi secara intensif dan membujuk para petani untuk ikut serta berkontribusi dalam wacana sosialisasi tersebut sehingga petani atau kelompok tani dalam memberi edukasi masukan kepada pemerintah.

Untuk memperbaiki sikap pelaksana dalam mensukseskan program kartu tani ada beberapa kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kecamatan terkait adanya

kecenderungan sikap menolak dari beberapa petani yang menganggap program Kartu Tani Sistem Bertani Dengan *Agro Solution* dipandang rumit, pemerintah kecamatan arjasari bergerak aktif turun langsung ke beberapa petani dan membuka kesempatan untuk para petani menanyakan semua hal terkait kartu tani yang belum mereka kuasai. Dengan demikian masyarakat khususnya para petani dapat menyampaikan secara langsung terkait saran, kritik, usulan atau saran kepada pemerintah kecamatan. Selain itu pemerintah kecamatanpun membuat grup sosial media untuk masing-masing ketua kelompok sehingga dapat berkomunikasi kapanpun dan bertukar informasi.

PENUTUP

Kesimpulan

Implementasi Kebijakan Program Kartu Tani Sistem Bertani Dengan *Agro Solution* Oleh Dinas Pertanian Di Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung pada pelaksanaannya menghadapi beberapa masalah atau hambatan. Komunikasi menjadi titik utama dalam suksesnya keberlangsungan pelayanan publik guna mewujudkan good governance sebab pemerintah berperan sebagai komunikator yang mengalirkan berbagai info pada masyarakat dan mempersuasi masyarakat agar ikut aktif dalam pengembangan sumber daya public. Permasalahan komunikasi yang terjadi dilapangan lebih kepada masalah sosialisasi Kurangnya sosialisasi sehingga Kartu

Tani Sistem Bertani Dengan *Agro Solution* belum dirasakan menyeluruh oleh para petani dan Masih adanya beberapa kelompok tani di kecamatan Arjasari yang kurang memahami tujuan dan manfaat dari program Kartu Tani Sistem Bertani Dengan *Agro Solution* Sumberdaya penting yang dimaksud dalam implementasi kebijakan antara lain mencakup personil yang mempunyai keahlian dan kemampuan untuk bisa melaksanakan tugas, di samping itu harus ada ketepatan atau kelayakan antara jumlah personil yang dibutuhkan dengan keahlian yang harus dimiliki dengan tugas yang akan dikerjakan. Kemampuan orang-orang yang terlibat dalam pembuatan kebijakan. Kualitas dari suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh kualitas orang-orang yang terlibat dalam proses penetapan kebijakan. hambatan Kecamatan Arjasari dari implementasi kartu tani dilihat dari sumberdaya indikator informasi cara melaksanakan kebijakan ialah Kurangnya koordinasi antara instansi terkait pendataan calon penerima manfaat Kartu Tani Sistem Bertani Dengan *Agro Solution* di Kecamatan Arjasari hal tersebut dibuktikan dengan adanya masalah dalam pendataan. Indikator yang digunakan untuk melihat sejauhmana sumberdaya dapat berjalan dengan baik dan rapi salah satunya yaitu informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Hambatan

terkait dengan data kepatuhan dari para pelaksana ialah Kurang kooperatifnya masyarakat kelompok tani di kecamatan Arjasari untuk mengikuti pembinaan peningkatan pemahaman dan pengetahuan mengenai peningkatan hasil pertanian.

Pemahaman tentang maksud dari standar dan tujuan kebijakan adalah penting, karena dengan pemahaman yang tinggi suatu implementasi kebijakan yang berhasil dapat jadi gagal ketika para pelaksana tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Hambatan dilapangan ialah Adanya kecenderungan sikap menolak dari beberapa petani yang menganggap program Kartu Tani Sistem Bertani Dengan *Agro Solution* dipandang rumit.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada dalam Implementasi Kebijakan Program Kartu Tani Sistem Bertani Dengan *Agro Solution* Oleh Dinas Pertanian Di Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung, Dari hasil observasi upaya yang dilakukan oleh para implementator untuk menangani masalah Kurangnya sosialisasi sehingga Kartu Tani Sistem Bertani Dengan *Agro Solution* belum dirasakan menyeluruh oleh para petani dan Masih adanya beberapa kelompok tani di kecamatan Arjasari yang kurang memahami tujuan dan manfaat dari program Kartu Tani Sistem Bertani Dengan *Agro Solution* ialah dengan mengadakan rapat rutin

bersama ketua 60 ketua kelompok tani yang tersebar di semua Desa di Kecamatan.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan untuk menangani masalah Kurangnya koordinasi antara instansi terkait pendataan calon penerima manfaat Kartu Tani Sistem Bertani Dengan *Agro Solution* di Kecamatan Arjasari ialah dengan menjalin kerjasama dengan instansi yang memang tugasnya fokus kepada pendataan, meningkatkan kemampuan atau skill yang kami punya dengan melatih kemampuan agar lebih teliti lagi dalam menginput data, berkoordinasi dengan disdukcapil terkait data. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan untuk menangani masalah Kurang kooperatifnya masyarakat kelompok tani di kecamatan Arjasari untuk mengikuti pembinaan peningkatan pemahaman dan pengetahuan mengenai peningkatan hasil pertanian mengajak langsung ke beberapa petani melalui ketua kelompok tani untuk ikut serta berperan dalam acara pelaksanaan sosialisasi yang di adakan di kantor kecamatan yang bertujuan agar petani dapat memahami terkait mekanisme kartu tani sistem bertani dengan *agro solution*.

Upaya yang dilakuakn oleh pemerintah kecamatan dalam menangani masalah Adanya kecenderungan sikap menolak dari beberapa petani yang menganggap program Kartu Tani Sistem Bertani

Dengan *Agro Solution* dipandang rumit ialah menjadwalkan rapat yang intens agar komunikasi antara kita dan masyarakat terus terjaga, dan menyediakan portal media sosial atau grup media sosial yang didalamnya beranggotakan semua ketua gabungan kelompok tani yang ada di Kecamatan Arjasari.

SARAN

Antara pihak masyarakat dan Pemerintah Kecamatan sebagai implementor dan diharapkan saling terbuka dan saling mengisi satu sama lain. Dalam faktor struktur birokrasi yang sudah terimplementasi dengan cukup baik, sebaiknya lebih ditingkatkan dalam faktor komunikasi, sumber daya dan disposisi dengan begitu diharapkan Implementasi Implementasi Kebijakan Program Kartu Tani Sistem Bertani Dengan *Agro Solution* Oleh Dinas Pertanian Di Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung dapat terimplementasi dengan baik dan optimal. Sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan belum sepenuhnya diketahui oleh masyarakat, sehingga perlu ditingkatkan lagi terkait penyuluhan yang dilakukan ke masyarakat, selain itu sumber daya manusia khususnya keterampilan tenaga staf yang menangani kartu tani yang masih kurang dapat ditingkatkan kembali sehingga tidak menghambat pelaksanaan implementasi, selain itu perlu adanya peningkatan saling kerjasama antara pemerintah kecamatan dan petani untuk sama-

sama memahami terkait program yang telah diluncurkan oleh pemerintah daerah.

Upaya sosialisasi kepada masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan diharapkan dapat ditingkatkan, sehingga masyarakat dapat memahami terkait bantuan kartu tani. Tingkatkan kembali kerjasama antar instansi.

DAFTAR PUSTAKA

- A.T Mosher. 1985. Menggerakkan dan Membangun Pertanian. Jakarta: CV. Yasaguna.BPP-SDMP. 2018 Pedoman Penilaian Kelas Kemampuan Kelompok Tani parteman Pertanian RI. Jakarta.
- Abdussamad, Zuchri. Metode Penelitian Kualitatif. Makassar: CV. syakir Media Press, 2021.
- Agustino, Leo. 2006. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: CV. Alfabeta.
- Arikunto, Suharsimi. 1998. Prosuder Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Bertens. 2005. Metode Belajar untuk Mahasiswa : Beberapa Petunjuk Bagi Mahasiswa Baru. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Carl J. Friedrich. 1963. Man and His Government. Newyork: Mc Graw-Hill.
- Winarno Budi, 2007. Kebijakan Publik: Teori dan Proses, (Edisi Revisi), Yogyakarta: Media Pressindo, ISBN -979-222-207-3.

Winarno, Budi. (2008). Kebijakan Publik (teori dan proses). Jakarta: Media Pressindo.

Sumber lain :

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Peraturan Bupati Nomor 138 Tahun 2021 Tentang "Program Petani Bedas Sejahtera". Pasal 1 Angka 9 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020

Pasal 1 Angka 9 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian